LAPORAN MONEV TAHUN 2025

LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN
APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN
TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2025
BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN
SEKRETARIAT DAERAH

I. PENDAHULUAN

a. Gambaran Umum

Visi

Dengan mempertimbangkan kemajuan yang telah dicapai pada periode 2025 - 2029; memperhatikan hasil analisis isu strategis; mengacu visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur yang terpilih untuk masa bakti 2025 - 2029, maka visi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 – 2029 adalah ;

SUMSEL sebagai Provinsi yang maju ekonominya, berbasiskan pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya Nusantara. Sumsel menjadi Provinsi berdaya saing, modern, tangguh, inovatif dan adil. Sumsel sebagai Provinsi yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip Pembangunan Berkeelanjutan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi seimbang dengan pembangunan sosial, berkelanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup, serta tata kelola yang baik.

Misi

Berdasarkan visi pembangunan yang telah ditetapkan, misi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 - 2029, yaitu :

Misi 1 : Mewujudkan Masyarakat Sumatera Selatan yang berkualitas, sehat, cerdas, inovatif, produktif, berakhlak, berkeadilan dan berkeadaban melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan sumber daya manusia yang berdaya saing.

Misi 2 : Mewujudkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya local dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

Misi 3 : Mewujudkan keterkaitan (nexus) yang kuat antara ketahanan pangan, ketahanan energi dan kedaulatan air sebagai Upaya mengatasi perubahan iklim.

Misi 4 : Meningkatkan Pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar kabupaten/kota dan pelayanan dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan.

Misi 5 : Memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta perlindungan social yang terjaga untuk menurunkan angka kemiskinan.

Misi 6 : Meningkatkan penyelenggaraan tata Kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan public yang berkualitas

1. Tujuan

Berdasarkan misi diatas, Biro umum dan perlengkapan akan menjalankan misi ke 6 yaitu meningkatkan penyelenggaraan tata Kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas. Yang bertujuan mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik.

2. Sasaran

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan Pemerintah Daerah
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
3. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kerumahtanggaan yang optimal;
4. Persentase Fasilitasi Sarana Prasarana yang optimal;
3. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Setda yang optimal.

3. Belanja, Program APBD

a) Belanja Perangkat Daerah

Total Pagu Anggaran Setda Provinsi Sumatera Selatan yang bersumber dari dana APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.279.331.371.532,- *(Dua ratus tujuh puluh sembilan milyar tiga ratus tiga puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah)*, yang terdiri atas :

Belanja Operasi : **Rp. 221.810.371.532**

- *Belanja Pegawai : Rp. 77.335.816.000*
- *Belanja Barang dan Jasa : Rp. 144.474.555.532*

Belanja Modal : **Rp. 57.521.000.000**

b) Program dan Anggaran APBD

Belanja langsung tersebut terdiri atas 1 Program, 10 Kegiatan dan 43 Sub Kegiatan, dengan program antara lain sebagai berikut :

1) Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi

a. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
h. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
i. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah

4. Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Sesuai dengan target kinerja yang tercantum pada Rencana Strategis Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 - 2029, Indikator Kinerja yang menjadi tugas Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut :

1) Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kerumahtanggaan yang optimal;
2) Persentase Fasilitasi Sarana Prasarana yang optimal;
3) Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Setda yang optimal.

5. Kegiatan OPD Berdasarkan Kewilayahan

Berdasarkan kewilayahan, Program/Kegiatan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan meliputi beberapa Biro-Biro yang melaksanakan kegiatan dalam kota Palembang, Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan dan Provinsi lain di Indonesia.

b. Latar Belakang Penyusunan Laporan

Maksud dan Tujuan penyusunan laporan ini adalah memenuhi amanat Surat Edaran Gubernur Nomor : 001/SE/Bappeda/2021 tanggal 13 Januari 2021 tentang Pedoman Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2021 serta sebagai bahan masukan PD dalam menyusun perencanaan tahun berikutnya.

II. EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN HINGGA TRIWULAN INI

Hasil evaluasi pelaksanaan program/kegiatan APBD P[Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 bulan Maret ini pada SKPD Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan antara lain sebagai berikut :

1. Realisasi Belanja Perangkat Daerah dana APBD

a). Realisasi Total Belanja

Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Keuangan (%)		Fisik (%)	
			Target s.d. triwulan ini	Realisasi s.d. triwulan ini	Target s.d. triwulan ini	Realisasi triwulan ini
(1)	(2)	(3)	(4)	(5 = 3/2 *100%)	(6)	(7)
Total Belanja	**279.331.371.532**	**33.019.131.124**	**30**	**11,82**	**100**	**17,5**
Belanja Operasi	**221.810.371.532**	**30.578.607.874**	**30**	**13,79**	**100**	**25**
- Belanja Pegawai	77.335.816.000	15.346.586.783	30	19,84	100	25
- Belanja Barang Jasa	144.474.555.532	15.232.021.091	30	10,54	100	25
- Belanja Modal	**57.521.000.000**	**2.440.523.250**	**30**	**4,24**	**100**	**10**

Realisasi Keuangan Total Belanja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan bulan Maret Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.33.019.131.124,- atau 11,82 dan realisasi fisik 17,5%.

b). Realisasi Belanja

No	Interval Nilai Realisasi terhadap Target	Kriteria Penilaian Realisasi	Status Realisasi
1	0% ≤ 65%	Rendah	Merah

1) Realisasi Belanja Operasi

Realisasi Keuangan Belanja Operasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan bulan Maret Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.30.578.607.874,- atau 13,79% dan realisasi fisik 25%.

2) Realisasi Belanja Modal

i. Realisasi Keuangan Belanja Modal Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Maret Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.2.440.523.250 atau 4,24% dan realisasi fisik 10%.

ii. Realisasi Fisik

Secara umum realisasi fisik program kegiatan realisasi per 31 Maret 2024 baru terealisasi sebesar 10%.

III. KENDALA YANG DIHADAPI DAN SARAN TINDAK LANJUT

Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Umum dan Perlengkapan telah berjalan dengan baik dan lancar, namun pada pelaksanaan masih terdapat beberapa faktor yang menghambat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Umum dan Perlengkapan, antara lain :

1. Kurangnya pemahaman Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur terhadap tugas pokok dan fungsi, kurangnya rasa tanggung jawab terhadap beban kerja yang diberikan atasan, masih rendahnya disiplin dalam bekerja.
2. Perubahan peraturan perundang-undangan yang dinamis yang kadangkala payung hukum aturan petunjuk pelaksanaannya belum terbit.
3. Adanya struktur organisasi yang kurang optimal dan efektif dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, seperti adanya overlapp tugas dan fungsi antar biro, adanya volume serta beban tugas dan fungsi yang kurang proposional dengan organisasi pelaksanaannya.

Agar faktor-faktor di atas tidak menghambat kinerja dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan, maka perlu dicarikan solusinya. Adapun solusi yang dilakukan untuk mengatasi masalah mengenai faktor-faktor yang menghambat kinerja, adalah :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur dengan mengikuti pelatihan-pelatihan, bimbingan teknis kedinasan, kursus-kursus, study banding baik di dalam maupun di luar Daerah yang berhubungan tugas pokok dan fungsinya
2. Melakukan koordinasi secara intens kepada pihak terkait mengenai peraturan perundang-undangann terutama dalam aturan pelaksanaannya seperti konsultasi kepada BPK-RI, Pemerintah Pusat, Kejaksaan, Kemendagri. BPKP dan pihak lainnya agar dapat dihindari kesalahan pelaksanaan karena adanya kurang pemahaman atau salah penafsiran.
3. Melakukan monitoring dan percepatan pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan jadwal yang sudah direncanakan.
4. Melakukan reorganisasi dengan melakukan usulan perubahan organisasi Sekretariat Daerah sesuai dengan kebutuhan organisasi agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi dapat berjalan efektif, efisien, dan optimal.
5. Melakukan monitoring dan percepatan pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan jadwal yang sudah direncanakan.

LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN
APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN
TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2025
BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN
SEKRETARIAT DAERAH

I. PENDAHULUAN

a. Gambaran Umum

Visi

Dengan mempertimbangkan kemajuan yang telah dicapai pada periode 2025 - 2029; memperhatikan hasil analisis isu strategis; mengacu visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur yang terpilih untuk masa bakti 2025 - 2029, maka visi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 – 2029 adalah ;

SUMSEL sebagai Provinsi yang maju ekonominya, berbasiskan pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya Nusantara. Sumsel menjadi Provinsi berdaya saing, modern, tangguh, inovatif dan adil. Sumsel sebagai Provinsi yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip Pembangunan Berkeelanjutan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi seimbang dengan pembangunan sosial, berkelanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup, serta tata kelola yang baik.

Misi

Berdasarkan visi pembangunan yang telah ditetapkan, misi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 - 2029, yaitu :

Misi 1 : Mewujudkan Masyarakat Sumatera Selatan yang berkualitas, sehat, cerdas, inovatif, produktif, berakhlak, berkeadilan dan berkeadaban melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan sumber daya manusia yang berdaya saing.

Misi 2 : Mewujudkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya local dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

Misi 3 : Mewujudkan keterkaitan (nexus) yang kuat antara ketahanan pangan, ketahanan energi dan kedaulatan air sebagai Upaya mengatasi perubahan iklim.

Misi 4 : Meningkatkan Pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar kabupaten/kota dan pelayanan dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan.

Misi 5 : Memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta perlindungan social yang terjaga untuk menurunkan angka kemiskinan.

Misi 6 : Meningkatkan penyelenggaraan tata Kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan public yang berkualitas

1. Tujuan

Berdasarkan misi diatas, Biro umum dan perlengkapan akan menjalankan misi ke 6 yaitu meningkatkan penyelenggaraan tata Kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas. Yang bertujuan mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik.

2. Sasaran

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan Pemerintah Daerah
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
3. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kerumahtanggaan yang optimal;
4. Persentase Fasilitasi Sarana Prasarana yang optimal;
3. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Setda yang optimal.

3. Belanja, Program APBD

a) Belanja Perangkat Daerah

Total Pagu Anggaran Setda Provinsi Sumatera Selatan yang bersumber dari dana APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.279.331.371.532,- *(Dua ratus tujuh puluh sembilan milyar tiga ratus tiga puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah)*, yang terdiri atas :

Belanja Operasi : **Rp. 221.810.371.532**

- *Belanja Pegawai : Rp. 77.335.816.000*
- *Belanja Barang dan Jasa : Rp. 144.474.555.532*

Belanja Modal : **Rp. 57.521.000.000**

b) Program dan Anggaran APBD

Belanja langsung tersebut terdiri atas 1 Program, 10 Kegiatan dan 43 Sub Kegiatan, dengan program antara lain sebagai berikut :

1) Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi

a. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
h. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
i. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah

4. Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Sesuai dengan target kinerja yang tercantum pada Rencana Strategis Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 - 2029, Indikator Kinerja yang menjadi tugas Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut :

1) Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kerumahtanggaan yang optimal;
2) Persentase Fasilitasi Sarana Prasarana yang optimal;
3) Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Setda yang optimal.

5. Kegiatan OPD Berdasarkan Kewilayahan

Berdasarkan kewilayahan, Program/Kegiatan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan meliputi beberapa Biro-Biro yang melaksanakan kegiatan dalam kota Palembang, Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan dan Provinsi lain di Indonesia.

b. Latar Belakang Penyusunan Laporan

Maksud dan Tujuan penyusunan laporan ini adalah memenuhi amanat Surat Edaran Gubernur Nomor : 001/SE/Bappeda/2021 tanggal 13 Januari 2021 tentang Pedoman Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2021 serta sebagai bahan masukan PD dalam menyusun perencanaan tahun berikutnya.

II. EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN HINGGA TRIWULAN INI

Hasil evaluasi pelahy ksanaan program/kegiatan APBD P[Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 bulan Maret ini pada SKPD Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan antara lain sebagai berikut :

1. Realisasi Belanja Perangkat Daerah dana APBD

a). Realisasi Total Belanja

Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Keuangan (%)		Fisik (%)	
			Target s.d. triwulan ini	Realisasi s.d. triwulan ini	Target s.d. triwulan ini	Realisasi triwulan ini
(1)	(2)	(3)	(4)	(5 = 3/2 *100%)	(6)	(7)
Total Belanja	**286.011.319.503**	**93.010.983.228**	**50**	**32,52**	**100**	**35**
Belanja Operasi	**231.906.108.783**	**83.320.027.548**	**50**	**36,58**	**100**	**45**
- Belanja Pegawai	84.015.763.971	34.454.912.855	50	41,01	100	50
- Belanja Barang Jasa	147.890.344.812	48.865.114.693	50	33,86	100	40
- Belanja Modal	**54.105.210.720**	**9.690.955.680**	**50**	**17,91**	**100**	**25**

Realisasi Keuangan Total Belanja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan bulan Juni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.93.010.983.228,- atau 32,52% dan realisasi fisik 35%.

b). Realisasi Belanja88

No	Interval Nilai Realisasi terhadap Target	Kriteria Penilaian Realisasi	Status Realisasi
1	0% ≤ 65%	Rendah	Merah

1) Realisasi Belanja Operasi

Realisasi Keuangan Belanja Operasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan bulan Juni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.83.320.027.548,- atau 36,58% dan realisasi fisik 45%.

2) Realisasi Belanja Modal

i. Realisasi Keuangan Belanja Modal Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan bulan Juni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.54.105.210.720 atau 17,91% dan realisasi fisik 25%.

ii. Realisasi Fisik

Secara umum realisasi fisik program kegiatan realisasi per 30 Juni 2025 baru terealisasi sebesar 35%.

III. KENDALA YANG DIHADAPI DAN SARAN TINDAK LANJUT

Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Umum dan Perlengkapan telah berjalan dengan baik dan lancar, namun pada pelaksanaan masih terdapat beberapa faktor yang menghambat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Umum dan Perlengkapan, antara lain :

1. Kurangnya pemahaman Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur terhadap tugas pokok dan fungsi, kurangnya rasa tanggung jawab terhadap beban kerja yang diberikan atasan, masih rendahnya disiplin dalam bekerja.
2. Perubahan peraturan perundang-undangan yang dinamis yang kadangkala payung hukum aturan petunjuk pelaksanaannya belum terbit.
3. Adanya struktur organisasi yang kurang optimal dan efektif dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, seperti adanya overlapp tugas dan fungsi antar biro, adanya volume serta beban tugas dan fungsi yang kurang proposional dengan organisasi pelaksanaannya.

Agar faktor-faktor di atas tidak menghambat kinerja dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan, maka perlu dicarikan solusinya. Adapun solusi yang dilakukan untuk mengatasi masalah mengenai faktor-faktor yang menghambat kinerja, adalah :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur dengan mengikuti pelatihan-pelatihan, bimbingan teknis kedinasan, kursus-kursus, study banding baik di dalam maupun di luar Daerah yang berhubungan tugas pokok dan fungsinya
2. Melakukan koordinasi secara intens kepada pihak terkait mengenai peraturan perundang-undangann terutama dalam aturan pelaksanaannya seperti konsultasi kepada BPK-RI, Pemerintah Pusat, Kejaksaan, Kemendagri. BPKP dan pihak lainnya agar dapat dihindari kesalahan pelaksanaan karena adanya kurang pemahaman atau salah penafsiran.
3. Melakukan monitoring dan percepatan pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan jadwal yang sudah direncanakan.
4. Melakukan reorganisasi dengan melakukan usulan perubahan organisasi Sekretariat Daerah sesuai dengan kebutuhan organisasi agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi dapat berjalan efektif, efisien, dan optimal.
5. Melakukan monitoring dan percepatan pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan jadwal yang sudah direncanakan.

LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN
APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN
TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2025
SEKRETARIAT DAERAH

I. PENDAHULUAN

a. Gambaran Umum

Visi

Dengan mempertimbangkan kemajuan yang telah dicapai pada periode 2025 - 2029; memperhatikan hasil analisis isu strategis; mengacu visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur yang terpilih untuk masa bakti 2025 - 2029, maka visi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 – 2029 adalah ;

SUMSEL sebagai Provinsi yang maju ekonominya, berbasiskan pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya Nusantara. Sumsel menjadi Provinsi berdaya saing, modern, tangguh, inovatif dan adil. Sumsel sebagai Provinsi yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip Pembangunan Berkeelanjutan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi seimbang dengan pembangunan sosial, berkelanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup, serta tata kelola yang baik.

Misi

Berdasarkan visi pembangunan yang telah ditetapkan, misi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 - 2029, yaitu :

Misi 1 : Mewujudkan Masyarakat Sumatera Selatan yang berkualitas, sehat, cerdas, inovatif, produktif, berakhlak, berkeadilan dan berkeadaban melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan sumber daya manusia yang berdaya saing.

Misi 2 : Mewujudkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya local dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

Misi 3 : Mewujudkan keterkaitan (nexus) yang kuat antara ketahanan pangan, ketahanan energi dan kedaulatan air sebagai Upaya mengatasi perubahan iklim.

Misi 4 : Meningkatkan Pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar kabupaten/kota dan pelayanan dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan.

Misi 5 : Memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta perlindungan social yang terjaga untuk menurunkan angka kemiskinan.

Misi 6 : Meningkatkan penyelenggaraan tata Kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan public yang berkualitas

1. Tujuan

Berdasarkan misi diatas, Biro umum dan perlengkapan akan menjalankan misi ke 6 yaitu meningkatkan penyelenggaraan tata Kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas. Yang bertujuan mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik.

2. Sasaran

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan Pemerintah Daerah
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
3. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kerumahtanggaan yang optimal;
4. Persentase Fasilitasi Sarana Prasarana yang optimal;
3. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Setda yang optimal.

3. Belanja, Program APBD

a) Belanja Perangkat Daerah

Total Pagu Anggaran Setda Provinsi Sumatera Selatan yang bersumber dari dana APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.279.331.371.532,- *(Dua ratus tujuh puluh sembilan milyar tiga ratus tiga puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah)*, yang terdiri atas :

Belanja Operasi : **Rp. 221.810.371.532**

- *Belanja Pegawai : Rp. 77.335.816.000*
- *Belanja Barang dan Jasa : Rp. 144.474.555.532*

Belanja Modal : **Rp. 57.521.000.000**

b) Program dan Anggaran APBD

Belanja langsung tersebut terdiri atas 1 Program, 10 Kegiatan dan 43 Sub Kegiatan, dengan program antara lain sebagai berikut :

1) Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
   a. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
h. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
i. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah

4. Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Sesuai dengan target kinerja yang tercantum pada Rencana Strategis Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 - 2029, Indikator Kinerja yang menjadi tugas Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut :

1) Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kerumahtanggaan yang optimal;
2) Persentase Fasilitasi Sarana Prasarana yang optimal;
3) Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Setda yang optimal.

5. Kegiatan OPD Berdasarkan Kewilayahan

Berdasarkan kewilayahan, Program/Kegiatan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan meliputi beberapa Biro-Biro yang melaksanakan kegiatan dalam kota Palembang, Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan dan Provinsi lain di Indonesia.

b. Latar Belakang Penyusunan Laporan

Maksud dan Tujuan penyusunan laporan ini adalah memenuhi amanat Surat Edaran Gubernur Nomor : 001/SE/Bappeda/2021 tanggal 13 Januari 2021 tentang Pedoman Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2021 serta sebagai bahan masukan PD dalam menyusun perencanaan tahun berikutnya.

II. EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN HINGGA TRIWULAN INI

Hasil evaluasi pelahy ksanaan program/kegiatan APBD P[Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 bulan Maret ini pada SKPD Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan antara lain sebagai berikut :

1. Realisasi Belanja Perangkat Daerah dana APBD

a). Realisasi Total Belanja

Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Keuangan (%)		Fisik (%)	
			Target s.d. triwulan ini	Realisasi s.d. triwulan ini	Target s.d. triwulan ini	Realisasi triwulan ini
(1)	(2)	(3)	(4)	(5 = 3/2 *100%)	(6)	(7)
Total Belanja	**286.011.319.503**	**93.010.983.228**	**50**	**32,52**	**100**	**35**
Belanja Operasi	**231.906.108.783**	**83.320.027.548**	**50**	**36,58**	**100**	**45**
- Belanja Pegawai	84.015.763.971	34.454.912.855	50	41,01	100	50
- Belanja Barang Jasa	147.890.344.812	48.865.114.693	50	33,86	100	40
- Belanja Modal	**54.105.210.720**	**9.690.955.680**	**50**	**17,91**	**100**	**25**

Realisasi Keuangan Total Belanja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan bulan Juni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.93.010.983.228,- atau 32,52% dan realisasi fisik 35%.

b). Realisasi Belanja

No	Interval Nilai Realisasi terhadap Target	Kriteria Penilaian Realisasi	Status Realisasi
1	0% ≤ 65%	Rendah	Merah

1) Realisasi Belanja Operasi

Realisasi Keuangan Belanja Operasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan bulan Juni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.83.320.027.548,- atau 36,58% dan realisasi fisik 45%.

2) Realisasi Belanja Modal

i. Realisasi Keuangan Belanja Modal Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan bulan Juni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.54.105.210.720 atau 17,91% dan realisasi fisik 25%.

ii. Realisasi Fisik

Secara umum realisasi fisik program kegiatan realisasi per 30 Juni 2025 baru terealisasi sebesar 35%.

III. KENDALA YANG DIHADAPI DAN SARAN TINDAK LANJUT

Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Umum dan Perlengkapan telah berjalan dengan baik dan lancar, namun pada pelaksanaan masih terdapat beberapa faktor yang menghambat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Umum dan Perlengkapan, antara lain :

1. Kurangnya pemahaman Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur terhadap tugas pokok dan fungsi, kurangnya rasa tanggung jawab terhadap beban kerja yang diberikan atasan, masih rendahnya disiplin dalam bekerja.
2. Perubahan peraturan perundang-undangan yang dinamis yang kadangkala payung hukum aturan petunjuk pelaksanaannya belum terbit.
3. Adanya struktur organisasi yang kurang optimal dan efektif dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, seperti adanya overlapp tugas dan fungsi antar biro, adanya volume serta beban tugas dan fungsi yang kurang proposional dengan organisasi pelaksanaannya.

Agar faktor-faktor di atas tidak menghambat kinerja dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan, maka perlu dicarikan solusinya. Adapun solusi yang dilakukan untuk mengatasi masalah mengenai faktor-faktor yang menghambat kinerja, adalah :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur dengan mengikuti pelatihan-pelatihan, bimbingan teknis kedinasan, kursus-kursus, study banding baik di dalam maupun di luar Daerah yang berhubungan tugas pokok dan fungsinya
2. Melakukan koordinasi secara intens kepada pihak terkait mengenai peraturan perundang-undangann terutama dalam aturan pelaksanaannya seperti konsultasi kepada BPK-RI, Pemerintah Pusat, Kejaksaan, Kemendagri. BPKP dan pihak lainnya agar dapat dihindari kesalahan pelaksanaan karena adanya kurang pemahaman atau salah penafsiran.
3. Melakukan monitoring dan percepatan pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan jadwal yang sudah direncanakan.
4. Melakukan reorganisasi dengan melakukan usulan perubahan organisasi Sekretariat Daerah sesuai dengan kebutuhan organisasi agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi dapat berjalan efektif, efisien, dan optimal.
5. Melakukan monitoring dan percepatan pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan jadwal yang sudah direncanakan.

LAPORAN KONSOLIDASI PROGRAM DAN KEGIATAN APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN
BULAN JUNI TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan s.d. Bulan Ini			Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Outputs)					Tertimbang Fisik (%)	Lokasi
			Target (%)	Realisasi		Narasi	Realisasi Fisik s.d. Bulan Ini					
				%	(Rp)		Target Kinerja	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja	Realisasi Fisik (%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
I	**PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM**	**2.410.000.000**	30,00	12,49	**300.987.965**	**Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi Hukum**		30,00		**0,00**	**0,00**	
1	**Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan**	**1.195.000.000**	30,00	13,62	162.813.205	**Terlaksananya penyusunan perundang-undangan**		30,00		**0,00**	**0,00**	
1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	400.000.000	30,00	14,34	57.363.696	Jumlah Penerbitan Peraturan Daerah (PERDA) Jumlah Penerbitan Peraturan Gubernur (PERGUB)	34 dokumen	30,00	-	0,00	0,00	Palembang
2	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	100.000.000	30,00	30,46	30.460.161	Jumlah Penelitian dan Penelaahan Draft Keputusan Gubenur Sumatera Selatan	780 dokumen	30,00	-	0,00	0,00	Palembang
3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	320.000.000	30,00	4,66	14.907.635	1. Jumlah Kabupaten/Kota yang dibina/Monitoring dan produk hukum provinsi yang di Updating/Upload ke website 2. Jumlah koleksi dan tersosialisasinya Peraturan Perundang-Undangan pusat dan daerah 3. Jumlah Produk Hukum Daerah yang disebarluaskan melalui media cetak	6 dokumen	30,00	-	0,00	0,00	Kab/Kota se Provinsi Sumatera Selatan
4	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	375.000.000	30,00	16,02	60.081.713	Jumlah produk hukum kab/kota yang dapat dievaluasi, fasilitasi dan klarifikasi	470 dokumen	30,00	-	0,00	0,00	Kab/Kota se Provinsi Sumatera Selatan
2	**Fasilitasi Bantuan Hukum**	**1.215.000.000**	30,00	11,37	**138.174.760**	**Tersedianya fasilitasi bantuan hukum**		30,00		**0,00**	**6,38**	
5	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	1.025.000.000	30,00	7,91	81.087.328	1. Jumlah Bantuan Hukum Cuma-Cuma kepada masyarakat miskin 2. Jumlah Perkara yang menyangkut kepentingan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 3. Jumlah Rapat dan Koordinasi 4. Penyelesaian Permasalaha Hukum, Perdata Pidana dan Tata Usaha Negara (tun) yang diselesaikan 5. Terfasilitasinya Produk Hukum Daerah Kab/Kota	53 kasus	30,00	15%	15,00	6,38	Palembang
6	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	190.000.000	30,00	30,05	57.087.432	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pengendalian Program RANHAM Provinsi dan Koordinasi Pelaksanaan RANHAM Kab/Kota Jumlah Masyarakat yang mengikuti Penyuluhan Hukum	1 kasus	30,00	-	0,00	0,00	Palembang
II	**PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG**	**7.829.000.000**	30,00	3,96	310.200.676	**Terwujudnya kebijakan dan pelayanan pengadaan barang dan jasa**		30,00		**0,00**	**0,00**	

1	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**3.219.000.000**	30,00	9,26	298.044.500	**Terlaksananya pengelolaan pengadaan barang dan jasa**		30,00		**0,00**	**0,27**	
7	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	430.000.000	30,00	2,41	10.379.000	Jumlah laporan hasil strategi pengadaan barang dan jasa	4 laporan	30,00	0	5,00	0,27	Palembang
8	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	2.339.000.000	30,00	1,36	31.745.500	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengadaan barang dan jasa	12 laporan	30,00	0	0,00	0,00	Palembang
9	Pemantauan dan Evaluasi Barang dan Jasa	450.000.000	30,00	7,30	32.858.000	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pengadaan barang dan jasa	12 laporan	30,00		0,00	4,79	Palembang
2	**Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik**	**Rp 1.450.000.000**	30,00	0,00	-	Jumlah laporan pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik	4 laporan	30,00	3 bulan	50,00	4,79	Palembang
11	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Rp 750.000.000	30,00	39,67	158.685.000	Terlaksananya pembinaan dan pendampingan konsultasi pengadaan barang dan jasa		30,00		**0,00**	**0,00**	
12	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Rp 400.000.000	30,00	12,68	38.027.000	Jumlah laporan pengembangan sistem informasi pengadaan barang dan jasa	4 laporan	30,00	-	0,00		Palembang
13	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Rp 300.000.000	30,00	8,78	26.350.000	Jumlah laporan pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa	4 laporan	30,00	-	0,00	0,00	Kab/Kota di Prov.Sumsel
2	**Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa**	**Rp 3.160.000.000**	30,00	0,38	12.156.176	Terwujudnya pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa		30,00				

14	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Rp	1.650.000.000	30,00	3,90	64.328.750	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	41 orang	30,00	-	1,00	0,98	Palembang
15	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp	510.000.000	30,00	2,17	11.064.467	Jumlah dokumen hasil penataan kelembagaan pengadaan barang dan jasa	5 dokumen	30,00	-	3,00	0,65	Palembang
16	Pendampingan, Konsultasi dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Bar	Rp	1.000.000.000	30,00	15,61	156.058.419	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaaan barang dan jasa	4 laporan	30,00	-	4,00	8,89	Palembang
III	**PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**	**Rp**	**830.000.000**	30,00	8,74	**72.547.210**	**Terlaksananya Kebijakan Adiministrasi Pembangunan**		30,00		**0,00**	**0,00**	
1	**Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah**	**Rp**	**470.000.000**	30,00	10,96	**51.506.260**	**Tersusunnya dokumen hasil pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBD, APBN, dan wilayah**		30,00	0	**0,00**	**0,00**	
17	Pengendaliaan Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Rp	200.000.000	30,00	14,99	29.985.260	Jumlah dokumen hasil pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBD	1 Laporan	30,00	0%	0,00	0,00	Palembang
18	Pengendaliaan Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Rp	120.000.000	30,00	9,01	10.806.300	Jumlah dokumen hasil pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBN	1 Laporan	30,00	0%	0,00	0,00	Palembang
19	Pengendaliaan Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Rp	150.000.000	30,00	7,14	10.714.700	Jumlah dokumen hasil pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah	1 Laporan	30,00	0%	0,00	0,00	Palembang
2	**Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah**	**Rp**	**360.000.000**	30,00	5,84	**21.040.950**	**Tersusunnya dokumen hasil analisis capaian kinerja pembangunan daerah, hasil pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah dan dan dokumen hasil fasilitasi kebijakan teknis pembangunan**		30,00		**0,00**	**0,00**	
20	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Rp	120.000.000	30,00	8,86	10.634.950	Jumlah dokumen hasil analisis capaian kinerja pembangunan daerah pelaksanaan pembangunan daerah	1 dokumen	30,00	0	0,00	0,00	Palembang
21	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Rp	120.000.000	30,00	0,00	-	Jumlah dokumen hasil pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah	1 Dokumen	30,00	0	0,00	0,00	Palembang
22	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Rp	120.000.000	30,00	8,67	10.406.000	Jumlah dokumen hasil fasilitasi kebijakan teknis pembangunan	1 Dokumen	30,00	0	0,00	0,00	Palembang
IV	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH**	**Rp**	**4.609.092.000**	30,00	1087,69	**50.132.857.291**	**Terlaksananya program pemerintahan dan otonomi daerah**		30,00		**0,00**	**0,00**	
1	**Pelaksanaan Tugas Pemerintahan**	**Rp**	**1.200.000.000**	30,00	0,00	-	**Tersedianya fasilitasi pelaksanaan pemerintahan umum dan fasilitasi penataan wilayah**		30,00		**0,00**	**5,21**	
23	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Rp	800.000.000	30,00	20,12	160.953.682	Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintah Umum Dokumen Hasil Koordinasi Pembinaan Kecamaan 75 Kecamatan Dokumen Hasil Koordinasi Pembinaan PATEN di Kecamatan Sumsel	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	30,00	0	25,00	4,34	75 Kecamatan di Prov.Sumsel

24	Fasilitasi Pelaksanaan Wilayah	Rp	400.000.000	30,00	25,06	100.247.607	Jumlah pilar permanen yang terpasang Jumlah Lokasi Penanaman Rupa Bumi yang teridentifikasi Jumlah Pemekaran Kecamatan Jumlah Penyelesaian Batas Wilayah	10 Pilar 3 Lokasi 3 Pembentukan Pemekaran Kecamatan 5 Batas Bermasalah, 5 Pelacakan, Batas dan rekonstruksi batas	30,00	0	10,00	0,87	Kab/Kota di Prov.Sumsel
25	Fasilitasi Penataan Wilayah	Rp	750.000.000	30,00	16,79	125.932.811	Jumlah pilar permanen yang terpasang Jumlah Lokasi Penanaman Rupa Bumi yang teridentifikasi Jumlah Pemekaran Kecamatan Jumlah Penyelesaian Batas Wilayah		30,00	0	10,00	6,25	Palembang
2	**Pelaksanaan Otonomi Daerah**	**Rp**	**3.348.292.000**	30,00	0,00	-	Tersedianya fasilitasi administrasi kepala daerah dan DPRD, Terlaksananya Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemeritahan		30,00	0	0,00	8,02	
25	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Rp	2.000.000.000	30,00	10,84	216.828.402	Jumlah Dokumen Calon PAW Anggota DPRD Kab/Kota yang teridentifikasi Jumlah izin yang diterbitkan Jumlah Kepala Daerah yang ilantik Jumlah Kunker DPR RI, DPD RI, DPRD Prov/Kab/Kota yang difasilitasi	1 Dokumen 50 Dokumen 40 Dokumen 40 Dokumen 1 Dokumen	30,00	0	5,00	2,17	Kab/Kota di Prov.Sumsel
26	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp	1.348.292.000	30,00	29,84	402.298.461	Jumlah Dokumen LKPJ Gubernur Sumsel Akhir Tahun Anggaran 2022 Jumlah Dokumen LPPD Prov.Sumsel Tahun 2022 Jumlah Dokumen RLPPD Prov.Sumsel Tahun 2022 Jumlah Laporan Pemantauan Pelaksanaan SPM di Kab/Kota	3 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	30,00	0	20,00	5,85	Kab/Kota di Prov.Sumsel
3	**Fasilitasi Kerjasama Daerah**	**Rp**	**60.800.000**	30,00	82455,36	**50.132.857.291**	Tersedianya fasilitasi kerjasama daerah Jumlah Kerjasama Antar Pemerintah yang difasilitasi (draft MOU)		30,00		0,00	0,03	Palembang
27	Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah	Rp	60.800.000	30,00	82455,36	50.132.857.291	Tersedianya fasilitasi kerjasama daerah Jumlah Kerjasama Antar Pemerintah yang difasilitasi (draft MOU)	1 Dokumen 45 Dokumen	30,00	20%	2,00	0,03	Palembang
V	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Rp**	**2.100.599.000**	30,00	0,00	-	**Terlaksananya Program Perekonomian dan Pembangunan**		30,00		**0,00**	**0,00**	
1	**Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian**	**Rp**	**1.247.299.000**	30,00	1,33	16.648.200	**Terlaksananya Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian**		30,00		**0,00**	**2,97**	
28	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Rp	781.700.000	30,00	2,13	16.648.200	Jumlah Dokumen Data Percepatan Akses Keuangan Daerah, Pengendalian Inflasi Daerah yang dilakukan untuk peningkatan perekonomian masyarakat di Sumsel	20 Buku Laporan	30,00	0	5,00	1,86	Palembang
29	Fasilitasi Kebijakan Ekonomi Mikro	Rp	465.599.000	30,00	0,00	-	Jumlah dokumen data penyaluran pupuk bersubsidi Provinsi Sumatera Selatan	5 buku laporan	30,00	0	5,00	1,11	Palembang
2	**Pengelolaan kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam**	**Rp**	**688.300.000**	30,00	12,89	88.697.948	**Terlaksananya Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam**		30,00		**0,00**	**0,31**	

30	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan,, Kelautan dam Perikanan	Rp	330.000.000	30,00	16,56	54.631.840	Jumlah dokumen data dan informasi tentang kebijakan pertanian kehutanan, kelautan dan perikanan	1 dokumen 1 pameran	30,00	0	2,00	0,31	Palembang
31	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Rp	358.300.000	30,00	9,51	34.066.108	Jumlah dokumen data dan informasi tentang BLUD Jumlah Raperda BUMD	1 Dokumen	30,00	0	3,00	0,86	Palembang
3	**Pengelolaan Kebijakan dan koordinasi BUMD dan BLUD**	**Rp**	**165.000.000**	30,00	0,00	-	**Terlaksananya Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD**		30,00		**0,00**	**0,39**	
1	Koordinasi, sinkronisasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Rp	200.000.000	30,00	49,49	98.984.250			30,00				
2	Koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan pertambangan dan lingkungan hidup	Rp	468.600.000	30,00	2,96	13.880.805			30,00				
3	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Rp	165.000.000	30,00	0,00	-	Jumlah dokumen data dan informasi tentang BLUD	1 Raperda 10 buku laporan	30,00	0	5,00	0,39	Palembang
4	Koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD Jasaair minum, limbah sanitasi	Rp	220.000.000	30,00	2,62	5.772.100			30,00		5,00		Palembang
5	Koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum , Limbah dan	Rp	165.000.000	30,00	0,00	-			30,00		5,00		Palembang
6	Koordinasi, sinkroniasasi dan evaluasi kebijakan pendirian BUMD	Rp	660.000.000	30,00	2,09	13.822.905			30,00		5,00		Palembang
7	Koordinasi, sinkroniasasi dan evaluasi kebijakan pendirian BUMD	Rp	165.000.000	30,00	5,35	8.820.000			30,00		5,00		Palembang
VI	**PROGRAM PENATAAN ORGANISASI**	**Rp**	**1.475.000.000**	30,00	0,00	-	Terlaksananya program penataan organisasi		30,00		**0,00**		
1	**Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan**	**Rp**	**520.000.000**	30,00	0,00	-	Tersedianya fasilitasi kelembagaan dan analisis jabatan		30,00		**0,00**		
33	Fasilitasi Penataan Kelembagaan provinsi	Rp	135.000.000	30,00	0,00	-	Jumlah Penataan Kelembagaan Provinsi	1 kegiatan	30,00	0	0,00		Palembang
34	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Rp	135.000.000	30,00	0,00	-	Jumlah Penataan Kelembagaan Kab/Kota	1 kegiatan	30,00	0	0,00		Kab/Kota se Sumsel
35	Penataan Analisis Jabatan	Rp	250.000.000	30,00	0,00	-	1. Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek Anjab, ABK dan Evjab 2. Terlaksananya Validasi Anjab, abk dan Evaluasi Jabatan	96 ASN 48 Dokumen	30,00	0	0,00		Palembang
2	**Fasilitasi Reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja**	**Rp**	**955.000.000**	30,00	0,00	-	Tersedianya fasilitasi reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja		30,00		**0,00**		
36	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Rp	225.000.000	30,00	0,00	-	Jumlah Dokumen pembinaan pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	30,00	0	0,00		Palembang
37	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Rp	270.000.000	30,00	0,00	-	Jumlah ASN di Provinsi Sumatera Selatan dan Kab/Kota yang mengikuti BIMTEK Sakip	150 ASN	30,00	0	0,00		Palembang
38	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Rp	140.000.000	30,00	0,00	-	Jumlah Dokumen Evaluasi Budaya Kerja	100%	30,00	0	0,00		Palembang
39	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Rp	170.000.000	30,00	0,00	-	1. Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi Tata Naskah Dinas 2. Terlaksananya Penyelenggaraan Forum Sekretaris Daerah se-Indonesia (Forsesdasi)	150 ASN 12 Bulan	30,00	0	0,00		Palembang
40	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Rp	150.000.000	30,00	0,00	-	1. Jumlah Dokumen Pembinaan Kinerja ASN di lingkup Pemprov.Sumsel 2. Jumlah Lembaga Pelayanan Publik yang mengikuti pembinaan dan pelaksanaan kompetisi 3. Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan failitasi	1 Dokumen 5 Lembaga 49 PD per Kab/Kota	30,00	0	0,00		49 PD per Kab/Kota

VII	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN**	**Rp 364.578.794.532**	30,00		50.811.121.328	**Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi, adiministrasi keuangan, sdiminitrasi barang milik daerah, adminitrasi kepegawaian, administrasi umum dan lainnya**		30,00		**0,00**	**0,00**	
1	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daera**	**Rp 385.800.000**	30,00	31,21	**120.403.450**	**Tersedianya Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		30,00		**0,00**	**0,05**	
41	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 93.800.000	30,00	34,09	31.978.250	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	30,00	25%	25,00	0,01	Palembang
42	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 38.500.000	30,00	40,25	15.497.300	Cetakan dokumen RKA	1 kegiatan	30,00	1 kegiatan	100,00	0,01	Palembang
43	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp 38.500.000	30,00	99,91	38.466.400	Jumlah Dokumen RKA	1 kegiatan	30,00	0	25,00	0,00	Palembang
44	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp 38.500.000	30,00	0,00	-	Jumlah Dokumen DPA	1 kegiatan	30,00	1 kegiatan	100,00	0,01	Palembang
45	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp 38.500.000	30,00	0,00	-	Jumlah Dokumen Perubahan DPA	1 kegiatan	30,00	0	25,00	0,00	Palembang
46	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 66.000.000	30,00	52,21	34.461.500	Jumlah Dokumen LKJIP dan LPPD	2 Laporan	30,00	0	40,00	0,01	Palembang
47	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 72.000.000	30,00	0,00	-	Jumlah Aparatur yang menjadi Capacity Building SDM	1 Laporan	30,00	0	25,00	0,00	Palembang
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Rp 110.053.438.000**	30,00	17,58	**19.345.633.215**	**Terlaksananya administrasi keuangan**		30,00		**0,00**	**0,02**	
48	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 67.674.918.000	30,00	28,29	19.143.663.215	Pembayaran Gaji dan Tunjangan Lainnya pada ASN di Lingkungan Sekretariat Daerah	12 bulan	30,00	3 bulan	0,00	0,00	Palembang
49	Belanja Tambahan Penghasilan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.501.881.500	30,00	0,00	-	Pembayaran Tambahan Penghasilan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	12 bulan	30,00	3 bulan	0,00	0,00	Palembang
50	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	Rp 41.063.520.000	30,00	12,92	5.305.578.052,00	Pembayaran Tambahan Penghasilan ASN	12 bulan	30,00	3 bulan	0,00	0,00	Palembang
51	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp 1.100.000.000	30,00	18,36	201.970.000	Honorarium bendahara Honorarium Pengadaaan	12 Dokumen	30,00	3 bulan	5,00	0,02	Palembang
52	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 25.000.000	30,00	0,00	-							
53	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 30.000.000	30,00	0,00	-							
54	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 30.000.000	30,00	0,00	-							
55	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesterasn SKPD	Rp 130.000.000	30,00	0,00	-							
3	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Rp 2.080.000.000**			**18.630.200**							
52	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Rp 1.650.000.000	30,00	0,00	-	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	30,00	0	0,00	0,00	Palembang
53	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 130.000.000	30,00	7,70	10.015.200	Jumlah Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 kegiatan	30,00	60%	0,00	0,00	Palembang
54	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 300.000.000	30,00	2,87	8.615.000	Jumlah dokumen penatausahaan barang milik daerah	1 Laporan	30,00	0	0,00	0,00	Palembang
4	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Rp 2.921.435.580**	30,00	0,58	**17.000.000**	**Terlakananya Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah**		30,00		**0,00**	**0,00**	
55	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp 2.535.535.580	30,00	0,00	-	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas PNS dan Non PNS	1 kegiatan	30,00	10%	0,00	0,00	Palembang
57	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 185.900.000	30,00	9,14	17.000.000	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat PIM III dan IV	100%	30,00	0	0,00	0,00	Palembang
59	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Rp 200.000.000	30,00	0,00	-	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek Perundang-undangan	30 orang	30,00	0	0,00	0,00	Palembang
5	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Rp 36.571.000.000**	30,00	13,02	**4.763.080.539**	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		30,00		**0,00**	**0,32**	

60	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp	800.000.000	30,00	61,91	495.300.000	Jumlah komponen instalasi listrik di lingkungan Setda	1 tahun	30,00	3 bulan	5,00	0,01	Palembang
62	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp	3.871.000.000	30,00	7,42	287.284.510	Jumlah Bahan Logistik kantor	1 kegiatan	30,00	3 bulan	0,00	0,00	Palembang
63	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp	500.000.000	30,00	19,85	99.232.731	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	30,00	0	0,00	0,00	Palembang
65	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp	22.000.000.000	30,00	13,24	2.911.728.295	Jumlah fasilitasi kunjungan tamu	1 kegiatan	30,00	3 bulan	5,00	0,30	Palembang
66	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp	9.000.000.000	30,00	10,66	959.722.103	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1500 Laporan	30,00	10%	0,00	0,00	kab/kota Prov.Sumsel dan luar daerah/ luar negeri
67	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp	400.000.000	30,00	2,45	9.812.900	Jumlah Arsip Dinamis pada Sekretariat Daerah	2 Dokumen	30,00	10%	10,00	0,01	Palembang
6	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan**	**Rp**	**22.328.279.700**	30,00	24,54	**5.478.686.600**	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 kegiatan	30,00		0,00	0,00	Palembang
68	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp	7.798.279.700	30,00	0,00	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20 unit	30,00	0	0,00	0,00	Palembang
70	Pengadaan Mebel	Rp	2.530.000.000	30,00	15,66	396.075.750	Pembelian Meubeler	20 Paket	30,00	10%	0,00	0,00	Palembang
72	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lain	Rp	12.000.000.000	30,00	42,36	5.082.610.850	Jumlah Prasarana Aset Tak Berwujud	18 Unit	30,00	10%	0,00	0,00	Palembang
7	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Rp**	**53.908.646.000**	30,00	13,74	**7.409.729.144**	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	150 jenis	30,00	10%	0,00	0,00	Palembang
73	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp	200.000.000	30,00	15,00	30.000.000	Pembelian Materai, Jasa Pengiriman Surat	12 Laporan	30,00	20%	0,00	2,52	
74	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	13.000.000.000	30,00	13,34	1.733.592.644	Jumlah Tagihan telepon, air dan listrik	12 Laporan	30,00	20%	25,00	0,89	Palembang
75	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp	26.000.000.000	30,00	15,52	4.035.888.500	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	30,00	10%	20,00	1,43	Palembang
76	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	14.708.646.000	30,00	10,95	1.610.248.000	Jumlah pelaksanaan acara/kegiatan	12 Laporan	30,00	pelaksanaan acara selama 3 bulan	5,00	0,20	Palembang
8	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**	**Rp**	**63.830.394.252**	30,00	7,60	**4.853.330.429**	Terlaksananya pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		30,00		**0,00**	0,00	Palembang
77	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kenda	Rp	1.000.000.000	30,00	9,27	92.687.500	Jumlah Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 kegiatan	30,00	10	20,00	**1,43**	
78	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional atau Lapangan	Rp	12.983.074.300	30,00	14,69	1.906.609.169	Jumlah Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	1 kegiatan	30,00	10	15,00	0,53	Palembang
79	Pemeliharaan Mebel	Rp	800.000.000	30,00	21,58	172.657.000	Jumlah mebel yang dipelihara	1 Paket	30,00	10%	10,00	0,02	Palembang
82	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp	46.975.500.000	30,00	4,76	2.235.625.800	Jumlah bangunan dan gedung kantor yang tepelihara secara rutin dan baik	26 Aset bangunan dan gedung kantor	30,00	10	0,00	0,00	Palembang
83	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Bang	Rp	2.071.819.952	30,00	21,51	445.750.960	Jumlah sarana dan prasarana bangunan dan gedung kantor yang tepelihara secara rutin dan baik	1 kegiatan	30,00	20	0,00	0,00	Palembang
9	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil**	**Rp**	**12.675.898.000**	30,00	8,91	**1.129.558.404**	Terlakasananya administrasi keuangan dan operasional KDH dan WKDH		30,00	25%	25,00	0,87	Palembang
84	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daer	Rp	2.171.437.000	30,00	1,58	34.221.218	Gaji dan Tunjangan KDH dan WKDH		30,00		**0,00**	0,00	Palembang
85	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		3.000.000.000	30,00	16,21	486.420.986	Pakaian Dinas DAN atribut Kelengkapan KDH dan WKDH	1 Kegiatan	30,00	10	0,00	**0,00**	

86	Penyediaan Dana Penunjang Operasional KDH dan WKDH	Rp 7.489.461.000	30,00	8,13	608.916.200	Tersedianya Dana Operasional KDH/WKDH	1 kegiatan	30,00	0	0,00	0,00	Palembang
87	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daer	Rp 15.000.000	30,00	0,00	-	Terlaksananya Medical Check Up KDH dan WKDH	1 kegiatan	30,00	0	0,00	0,00	Palembang
10	**Fasilitasi Kerumahtanggan Sekretariat Daerah**	**Rp 15.750.000.000**	30,00	16,55	**2.607.144.970**	Tersedianya fasilitasi Kerumahtangaan Sekretaris Daerah	1 kegiatan	30,00	0	0,00	0,00	Palembang
88	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Rp 11.000.000.000	30,00	14,36	1.579.100.600	Kebutuhan KDH	100%	30,00	10%	0,00	0,00	Palembang
89	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Rp 3.250.000.000			643.071.600							
90	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretaris Daerah	Rp 1.500.000.000	30,00	25,66	384.972.770	Kebutuhan Sekretaris Daerah	100%	30,00	10%	0,00	0,00	Palembang
11	**Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan**	**Rp 33.073.903.000**	30,00	11,64	**3.848.538.083**	Tersedianya fasilitasi materi dan Komunikasi Pimpinan	100%	30,00	10%	0,00	0,00	Palembang
91	Penyiapan Materi Pimpinan	Rp 4.050.000.000	30,00	14,78	598.637.240	Penyusunan dan penggandaan bahan materi rapat dalam bentuk naskah pidato pimpinan serta terwujudnya penyebaran informasi pembangnan berbagai event dalam bentuk buku dan majalah	300 kali kegiatan	30,00	25%	0,00	0,00	Palembang
92	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Rp 3.250.000.000	30,00	12,41	403.281.332	Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan pimpinan serta melaksanakan koordinasi dan kesiapan sarana dan prasarana yang berhubungan dengan upacara hari besar, pengambilan sumpah dan pelantikan pejabat/pegawai, acara lainnya	250 kali kegiatan	30,00	20%	0,00	**0,00**	
93	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Rp 25.773.903.000	30,00	11,04	2.846.619.511	Melaksanakan penataan dan dokumentasi hasil pelaksanaan pembangunan atau pemerintahan serta melaksanakan pendokumentasian peliputan kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Sekretaris Daerah berdasarkanketentuan peraturan perundang-undangan	250 Media	30,00	5%	0,00	0,00	Palembang
12	**Fasilitasi Keprotokolan**	**Rp 11.000.000.000**	30,00	11,25	**1.238.016.494**	Tersedianya Fasilitasi Keprotokolan		30,00		**0,00**	0,00	Palembang
94	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Rp 6.850.000.000	30,00	8,92	610.691.920	Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatanpimpinan serta melaksanakan koordinasi dan kesiapan sarana prasarana yang berhubungan dengan upacara hari besar, pengambilan sumpah dan pelantikan pejabat/pegawai, acara lainnya	250 kali kegiatan	30,00	30%	0,00	0,00	palembang
95	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp 3.350.000.000	30,00	18,73	627.324.574	Melaksanakan tata protoler/laksana dalam rangka penyambutan tamu Pemerintah Daerah	200 Penerimaan Kunker	30,00	20%	0,00	**0,00**	
96	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Rp 800.000.000	30,00	0,00	-	Melaksakan pembinaan tata protokoler/laksana suatu kegiatan aktivitaspada Pimpinan Daerah	85 Orang	30,00	0	0,00	0,00	Palembang
VIII	**PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Rp 37.759.632.820**	30,00	0,00	-	Terlaksananya Program Kesejahteraan Rakyat berupa fasilitasi pembinaan mental spiritual, fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar dan Non Pelayanan Dasar	100%	30,00	0	0,00	0,00	Palembang
1	**Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual**	**Rp 36.784.732.820**	30,00	0,00	-	Tersedianya Fasilitasi Pembinan Mental Spiritual		30,00		**0,00**	0,00	Palembang

97	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Rp 20.510.000.000	30,00	20,48	4.200.000.000	Jumlah Kab/Kota yang menerima bantuan Gubernur di bidang keagamaan Hibah Organisasi Keagamaan Hibah Kepada Dewan Pengurus Pusat Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI)	17 Kab/Kota	30,00	0	0,00	0,00	Kab/Kota di Prov.Sumsel
97	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Rp 16.274.732.820	30,00	13,01	2.117.347.948	Rumusan Rekomendasi/Laporan/bahan Kebijakan	17 Kab/Kota	30,00	0	0,00	0,00	Kab/Kota di Prov.Sumsel
2	**Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar**	**Rp 447.700.000**	30,00	0,00	-	Tersedianya fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat Pelayanan Dasar		30,00		**0,00**	**0,00**	
98	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Rp 84.700.000	30,00	0,00	-	Jumlah Evaluasi, pengawasan dan pembinaan kelembagaan TP-UKS	17 Kab/Kota	30,00	0	0,00	0,00	kab/Kota di Prov.Sumsel
99	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Rp 181.500.000	30,00	12,38	22.477.935	Rumusan Rekomendasi/Laporan/bahan Kebijakan	17 Kab/Kota	30,00	0	0,00	0,00	Palembang
100	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Rp 181.500.000	30,00	0,00	-			30,00				
3	**Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Da**	**Rp 527.200.000**	30,00	0,00	-	**Tersedianya fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat Non Pelayanan Dasar**		30,00		**0,00**	**0,00**	
101	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	Rp 302.500.000	30,00	12,25	37.044.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	1 Dokumen	30,00	0	0,00	0,00	Palembang
102	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Transmigrsi dan Tenaga Kerja	Rp 84.700.000	30,00	0,00	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Transmigrsi dan Tenaga Kerja	1 Dokumen	30,00	0	0,00	0,00	Palembang
103	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informaika, Statistik, Persandian dan Perhubungan	Rp 140.000.000	30,00	0,00	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informaika, Statistik, Persandian dan Perhubungan	1 Dokumen	30,00	0	0,00	0,00	Palembang
	Jumlah 103 Kegiatan	**Rp 421.592.118.352**		**24,11**	**Rp 101.627.714.470**							

LAPORAN KONSOLIDASI PROGRAM DAN KEGIATAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BULAN SEPTEMBER TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan s.d. Bulan Ini			Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Outputs)					Tertimbang Fisik (%)	Lokasi
			Target (%)	Realisasi		Narasi	Realisasi Fisik s.d. Bulan Ini					
				%	(Rp)		Target Kinerja	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja	Realisasi Fisik (%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
I	**PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM**	**1.617.598.061**	75,00	37,85	**612.293.296**	**Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi Hukum**		100,00		**50,00**	**50,00**	
1	**Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan**	**540.794.866**	75,00	62,53	338.154.157	**Terlaksananya penyusunan perundang-undangan**		100,00		**70,00**	**22,64**	
1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	175.544.866	75,00	51,73	90.815.961	Jumlah Penerbitan Peraturan Daerah (PERDA) Jumlah Penerbitan Peraturan Gubernur (PERGUB)	34 dokumen	100,00	-	60,00	6,51	Palembang
2	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	53.000.000	75,00	78,28	41.486.586	Jumlah Penelitian dan Penelaahan Draft Keputusan Gubenur Sumatera Selatan	780 dokumen	100,00	-	80,00	2,62	Palembang
3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	107.250.000	75,00	64,30	68.965.700	1. Jumlah Kabupaten/Kota yang dibina/Monitoring dan produk hukum provinsi yang di Updating/Upload ke website 2. Jumlah koleksi dan tersosialisasinya Peraturan Perundang-Undangan pusat dan daerah 3. Jumlah Produk Hukum Daerah yang disebarluaskan melalui media cetak	6 dokumen	100,00	-	70,00	4,64	Kab/Kota se Provinsi Sumatera Selatan
4	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	205.000.000	75,00	66,77	136.885.910,00	Jumlah produk hukum kab/kota yang dapat dievaluasi, fasilitasi dan klarifikasi	470 dokumen	100,00	-	70,00	8,87	Kab/Kota se Provinsi Sumatera Selatan
2	**Fasilitasi Bantuan Hukum**	**1.076.803.195**	75,00	25,46	**274.139.139**	**Tersedianya fasilitasi bantuan hukum**		100,00		**30,00**	**23,08**	
5	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	976.325.295	75,00	20,19	197.124.007	1. Jumlah Bantuan Hukum Cuma-Cuma kepada masyarakat miskin 2. Jumlah Perkara yang menyangkut kepentingan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 3. Jumlah Rapat dan Koordinasi 4. Penyelesaian Permasalaha Hukum, Perdata Pidana dan Tata Usaha Negara (tun) yang diselesaikan 5. Terfasilitasinya Produk Hukum Daerah Kab/Kota	53 kasus	100,00	15%	30,00	18,11	Palembang
6	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	100.477.900	75,00	76,65	77.015.132	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pengendalian Program RANHAM Provinsi dan Koordinasi Pelaksanaan RANHAM Kab/Kota Jumlah Masyarakat yang mengikuti Penyuluhan Hukum	1 kasus	100,00	-	80,00	4,97	Palembang
II	**PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA**	**5.171.035.850**	75,00	31,84	1.646.450.229	**Terwujudnya kebijakan dan pelayanan pengadaan barang dan jasa**		100,00		**50,00**	**50,00**	

1	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**1.504.041.000**	75,00	36,13	543.381.154	**Terlaksananya pengelolaan pengadaan barang dan jasa**		100,00		**40,00**	**9,70**	
7	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	320.340.500	75,00	40,54	129.851.515	Jumlah laporan hasil strategi pengadaan barang dan jasa	4 laporan	100,00	0	45,00	2,79	Palembang
8	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	894.000.000	75,00	34,10	304.822.199	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengadaan barang dan jasa	12 laporan	100,00	0	40,00	6,92	Palembang
9	Pemantauan dan Evaluasi Barang dan Jasa	289.700.500	75,00	37,52	108.707.440	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pengadaan barang dan jasa	12 laporan	100,00		40,00	10,94	Palembang
2	**Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik**	**Rp 1.179.700.000**	75,00	79,97	565.371.503	Jumlah laporan pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik	4 laporan	100,00	3 bulan	80,00	10,94	Palembang
11	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Rp 707.000.000	75,00	57,72	408.065.500	Terlaksananya pembinaan dan pendampingan konsultasi pengadaan barang dan jasa		100,00		**60,00**	**1,33**	
12	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Rp 320.000.000	75,00	63,38	96.784.501	Jumlah laporan pengembangan sistem informasi pengadaan barang dan jasa	4 laporan	100,00	-	65,00		Palembang
13	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Rp 152.700.000	75,00	39,63	60.521.502	Jumlah laporan pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa	4 laporan	100,00	-	45,00	1,33	Kab/Kota di Prov.Sumsel
2	**Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa**	**Rp 2.487.294.850**	75,00	44,35	1.103.069.075	Terwujudnya pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa		100,00		50,00	82,69	

14	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Rp	1.379.294.850	75,00	33,66	464.219.582	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	41 orang	100,00	-	40,00	66,15	Palembang
15	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp	325.000.000	75,00	32,74	106.393.397	Jumlah dokumen hasil penataan kelembagaan pengadaan barang dan jasa	5 dokumen	100,00	-	35,00	12,72	Palembang
16	Pendampingan, Konsultasi dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Rp	783.000.000	75,00	68,00	532.456.096	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaaan barang dan jasa	4 laporan	100,00	-	70,00	189,20	Palembang
III	**PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**	**Rp**	**675.750.000**	75,00	51,91	**350.782.252**	**Terlaksananya Kebijakan Adiministrasi Pembangunan**		100,00		**60,00**	**60,00**	
1	**Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah**	**Rp**	**391.750.000**	75,00	50,87	**199.295.116**	**Tersusunnya dokumen hasil pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBD, APBN, dan wilayah**		100,00	0	**60,00**	**33,53**	
17	Pengendaliaan Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Rp	176.250.000	75,00	44,20	77.900.201	Jumlah dokumen hasil pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBD	1 Laporan	100,00	0%	50,00	13,04	Palembang
18	Pengendaliaan Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Rp	91.500.000	75,00	64,37	58.900.441	Jumlah dokumen hasil pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBN	1 Laporan	100,00	0%	70,00	9,48	Palembang
19	Pengendaliaan Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Rp	124.000.000	75,00	50,40	62.494.474	Jumlah dokumen hasil pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah	1 Laporan	100,00	0%	60,00	11,01	Palembang
2	**Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah**	**Rp**	**284.000.000**	75,00	53,34	**151.487.136**	**Tersusunnya dokumen hasil analisis capaian kinerja pembangunan daerah, hasil pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah dan dan dokumen hasil fasilitasi kebijakan teknis pembangunan**		100,00		**60,00**	**25,68**	
20	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Rp	91.500.000	75,00	64,71	59.207.230	Jumlah dokumen hasil analisis capaian kinerja pembangunan daerah pelaksanaan pembangunan daerah	1 dokumen	100,00	0	70,00	9,48	Palembang
21	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Rp	101.000.000	75,00	34,03	34.368.165	Jumlah dokumen hasil pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah	1 Dokumen	100,00	0	45,00	6,73	Palembang
22	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Rp	91.500.000	75,00	63,29	57.911.741	Jumlah dokumen hasil fasilitasi kebijakan teknis pembangunan	1 Dokumen	100,00	0	70,00	9,48	Palembang
IV	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH**	**Rp**	**63.682.777.550**	75,00	83,12	**52.930.761.799**	**Terlaksananya program pemerintahan dan otonomi daerah**		100,00		**85,00**	**85,00**	
1	**Pelaksanaan Tugas Pemerintahan**	**Rp**	**1.052.768.000**	75,00	103,92	**1.094.061.002**	**Tersedianya fasilitasi pelaksanaan pemerintahan umum dan fasilitasi penataan wilayah**		100,00		**70,00**	**0,64**	
23	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Rp	443.600.000	75,00	79,05	350.655.924	Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintah Umum Dokumen Hasil Koordinasi Pembinaan Kecamaan 75 Kecamatan Dokumen Hasil Koordinasi Pembinaan PATEN di Kecamatan Sumsel	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	100,00	0	50,00	0,35	75 Kecamatan di Prov.Sumsel

24	Fasilitasi Pelaksanaan Wilayah	Rp 609.168.000	75,00	44,46	270.825.222	Jumlah pilar permanen yang terpasang Jumlah Lokasi Penanaman Rupa Bumi yang teridentifikasi Jumlah Pemekaran Kecamatan Jumlah Penyelesaian Batas Wilayah	10 Pilar 3 Lokasi 3 Pembentukan Pemekaran Kecamatan 5 Batas Bermasalah, 5 Pelacakan, Batas dan rekonstruksi batas	100,00	0	30,00	0,29	Kab/Kota di Prov.Sumsel
25	Fasilitasi Penataan Wilayah	Rp 736.769.550	75,00	64,14	472.579.856	Jumlah pilar permanen yang terpasang Jumlah Lokasi Penanaman Rupa Bumi yang teridentifikasi Jumlah Pemekaran Kecamatan Jumlah Penyelesaian Batas Wilayah		100,00	0	50,00	34,99	Palembang
2	**Pelaksanaan Otonomi Daerah**	**Rp 1.970.009.550**	75,00	69,66	**1.372.352.481**	Tersedianya fasilitasi administrasi kepala daerah dan DPRD, Terlaksananya Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemeritahan		100,00	0	50,00	1,64	
25	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Rp 736.769.550	75,00	64,14	472.579.856	Jumlah Dokumen Calon PAW Anggota DPRD Kab/Kota yang teridentifikasi Jumlah izin yang diterbitkan Jumlah Kepala Daerah yang ilantik Jumlah Kunker DPR RI, DPD RI, DPRD Prov/Kab/Kota yang difasilitasi	1 Dokumen 50 Dokumen 40 Dokumen 40 Dokumen 1 Dokumen	100,00	0	25,00	0,29	Kab/Kota di Prov.Sumsel
26	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp 1.233.240.000	75,00	72,96	899.772.625	Jumlah Dokumen LKPJ Gubernur Sumsel Akhir Tahun Anggaran 2022 Jumlah Dokumen LPPD Prov.Sumsel Tahun 2022 Jumlah Dokumen RLPPD Prov.Sumsel Tahun 2022 Jumlah Laporan Pemantauan Pelaksanaan SPM di Kab/Kota	3 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	100,00	0	70,00	1,36	Kab/Kota di Prov.Sumsel
3	**Fasilitasi Kerjasama Daerah**	**Rp 60.660.000.000**	75,00	83,19	**50.464.348.316**	Tersedianya fasilitasi kerjasama daerah Jumlah Kerjasama Antar Pemerintah yang difasilitasi (draft MOU)		100,00		90,00	85,73	Palembang

27	Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah	Rp	60.660.000.000	75,00	83,19	50.464.348.316	Tersedianya fasilitasi kerjasama daerah Jumlah Kerjasama Antar Pemerintah yang difasilitasi (draft MOU)	1 Dokumen 45 Dokumen	100,00	20%	90,00	85,73	Palembang
V	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Rp**	**2.135.730.975**	75,00	46,00	**982.369.421**	**Terlaksananya Program Perekonomian dan Pembangunan**		100,00		**50,00**	**50,00**	
1	**Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian**	**Rp**	**820.481.900**	75,00	26,11	**214.248.831**	**Terlaksananya Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian**		100,00		**30,00**	**11,90**	
28	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Rp	489.313.500	75,00	32,21	157.607.666	Jumlah Dokumen Data Percepatan Akses Keuangan Daerah, Pengendalian Inflasi Daerah yang dilakukan untuk peningkatan perekonomian masyarakat di Sumsel	20 Buku Laporan	100,00	0	35,00	8,02	Palembang
29	Fasilitasi Kebijakan Ekonomi Mikro	Rp	331.168.400	75,00	17,10	56.641.165	Jumlah dokumen data penyaluran pupuk bersubsidi Provinsi Sumatera Selatan	5 buku laporan	100,00	0	25,00	3,88	Palembang
2	**Pengelolaan kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam**	**Rp**	**821.478.575**	75,00	52,38	430.309.927	**Terlaksananya Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam**		100,00		**60,00**	**9,47**	
30	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan,, Kelautan dam Perikanan	Rp	224.786.000	75,00	89,12	200.338.090	Jumlah dokumen data dan informasi tentang kebijakan pertanian kehutanan, kelautan dan perikanan	1 dokumen 1 pameran	100,00	0	90,00	9,47	Palembang
31	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Rp	238.188.125	75,00	23,47	55.913.839	Jumlah dokumen data dan informasi tentang kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	100,00		25,00	7,26	Palembang
32	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Rp	358.504.450	75,00	48,55	174.057.998	Jumlah dokumen data dan informasi tentang BLUD Jumlah Raperda BUMD	1 Dokumen	100,00	0	50,00	21,85	Palembang
3	**Pengelolaan Kebijakan dan koordinasi BUMD dan BLUD**	**Rp**	**493.770.500**	75,00	68,41	337.810.663	**Terlaksananya Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD**		100,00		**70,00**	**109,83**	
1	Koordinasi, sinkronisasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Rp	128.068.350	75,00	33,24	42.568.671	Jumlah dokumen data dan informasi tentang kebijakan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	1 Dokumen	100,00		35,00	13,54	Palembang
2	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Rp	103.412.500	75,00	20,78	21.486.240	Jumlah dokumen data dan informasi tentang kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	1 Dokumen	100,00		25,00	3,15	Palembang
3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Rp	493.770.500	75,00	40,14	198.186.619	Jumlah dokumen data dan informasi tentang Pengelolaan BUMD Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	1 Raperda 10 buku laporan	100,00	0	50,00	109,83	Palembang
4	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Rp	101.694.650	75,00	54,38	55.305.133	Jumlah dokumen data dan informasi tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	1 Dokumen	100,00		60,00	25,62	Palembang
5	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	Rp	73.924.000	75,00	27,41	20.264.000	Jumlah dokumen data dan informasi tentang pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum , Limbah dan Sanitasi	1 Dokumen	100,00		30,00	6,19	Palembang
VI	**PROGRAM PENATAAN ORGANISASI**	**Rp**	**888.884.600**	75,00	44,91	**399.191.192**	Terlaksananya program penataan organisasi		100,00		**50,00**		
1	**Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan**	**Rp**	**302.460.000**	75,00	26,70	**80.767.186**	Tersedianya fasilitasi kelembagaan dan analisis jabatan		100,00		**35,00**		
33	Fasilitasi Penataan Kelembagaan provinsi	Rp	75.560.000	75,00	14,17	10.710.000	Jumlah Penataan Kelembagaan Provinsi	1 kegiatan	100,00	0	20,00		Palembang
34	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Rp	66.900.000	75,00	30,57	20.448.088	Jumlah Penataan Kelembagaan Kab/Kota	1 kegiatan	100,00	0	35,00		Kab/Kota se Sumsel
35	Penataan Analisis Jabatan	Rp	160.000.000	75,00	31,01	49.609.098	1. Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek Anjab, ABK dan Evjab 2. Terlaksananya Validasi Anjab, abk dan Evaluasi Jabatan	96 ASN 48 Dokumen	100,00	0	30,00		Palembang

2	**Fasilitasi Reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja**	**Rp 586.424.600**	75,00	54,30	**318.424.006**	Tersedianya fasilitasi reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja		100,00		**60,00**		
36	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Rp 135.070.000	75,00	54,28	73.315.088	Jumlah Dokumen pembinaan pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	100,00	0	50,00		Palembang
37	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Rp 164.019.600	75,00	66,28	108.719.670	Jumlah ASN di Provinsi Sumatera Selatan dan Kab/Kota yang mengikuti BIMTEK Sakip	150 ASN	100,00	0	70,00		Palembang
38	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Rp 77.860.000	75,00	66,91	52.095.400	Jumlah Dokumen Evaluasi Budaya Kerja	100%	100,00	0	70,00		Palembang
39	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Rp 123.475.000	75,00	34,62	42.745.665	1. Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi Tata Naskah Dinas 2. Terlaksananya Penyelenggaraan Forum Sekretaris Daerah se-Indonesia (Forsesdasi)	150 ASN 12 Bulan	100,00	0	70,00		Palembang
40	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Rp 86.000.000	75,00	48,31	41.548.183	1. Jumlah Dokumen Pembinaan Kinerja ASN di lingkup Pemprov.Sumsel 2. Jumlah Lembaga Pelayanan Publik yang mengikuti pembinaan dan pelaksanaan kompetisi 3. Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan failitasi	1 Dokumen 5 Lembaga 49 PD per Kab/Kota	100,00	0	50,00		49 PD per Kab/Kota
VII	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN**	**Rp 356.965.466.611**	75,00	58,55	208.998.801.331	**Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi, adiministrasi keuangan, sdiminitrasi barang milik daerah, adminitrasi kepegawaian, administrasi umum dan lainnya**		100,00		**60,00**	**60,00**	
1	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Rp 385.800.000**	75,00	56,16	**216.665.825**	**Tersedianya Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja**		100,00		**60,00**	**0,06**	
41	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 93.800.000	75,00	34,09	31.978.250	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	100,00	25%	35,00	0,01	Palembang
42	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 38.500.000	75,00	99,98	38.490.725	Cetakan dokumen RKA	1 kegiatan	100,00	1 kegiatan	100,00	0,01	Palembang
43	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp 38.500.000	75,00	40,25	15.497.300	Jumlah Dokumen RKA	1 kegiatan	100,00	0	50,00	0,01	Palembang
44	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp 38.500.000	75,00	99,91	38.466.400	Jumlah Dokumen DPA	1 kegiatan	100,00	1 kegiatan	100,00	0,01	Palembang
45	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp 38.500.000	75,00	40,92	15.755.250	Jumlah Dokumen Perubahan DPA	1 kegiatan	100,00	0	50,00	0,01	Palembang
46	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 66.000.000	75,00	52,21	34.461.500	Jumlah Dokumen LKJIP dan LPPD	2 Laporan	100,00	0	60,00	0,01	Palembang
47	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 72.000.000	75,00	58,36	42.016.400	Jumlah Aparatur yang menjadi Capacity Building SDM	1 Laporan	100,00	0	60,00	0,01	Palembang
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Rp 118.859.946.000**	75,00	63,10	**74.997.037.601**	**Terlaksananya administrasi keuangan**		100,00		**60,00**	**25.219,00**	
48	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 77.167.530.000	75,00	69,19	53.393.780.864	Pembayaran Gaji dan Tunjangan Lainnya pada ASN di Lingkungan Sekretariat Daerah	12 bulan	100,00	9 bulan	70,00	15,13	Palembang
49	Belanja Tambahan Penghasilan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.501.881.500	75,00	0,00	-	Pembayaran Tambahan Penghasilan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	12 bulan	100,00	9 bulan	0,00	0,00	Palembang
50	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	Rp 39.401.468.000	75,00	51,76	20.392.379.091	Pembayaran Tambahan Penghasilan ASN	12 bulan	100,00	9 bulan	60,00	25.203,50	Palembang
51	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp 2.205.948.000	75,00	52,74	1.163.463.680	Honorarium bendahara Honorarium Pengadaaan	12 Dokumen	100,00	9 bulan	60,00	0,37	Palembang
52	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 25.000.000	75,00	99,89	24.972.500	Honorarium verifikator	12 bulan	100,00	9 bulan	100,00	6,48	Palembang
53	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 30.000.000	75,00	49,96	14.988.866	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Dokumen	100,00	1 Dokumen	50,00	15,99	Palembang
55	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesterasn SKPD	Rp 30.000.000	75,00	24,84	7.452.600	Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12 bulan	100,00	**3 Triwulan**	25,00	19,48	Palembang

3	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Rp**	**2.080.000.000**	75,00	2,61	**54.242.993**			100,00		**10,00**		
52	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Rp	1.650.000.000	75,00	0,00	-	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	100,00	0	0,00	0,00	Palembang
53	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp	130.000.000	75,00	35,10	45.627.993	Jumlah Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 kegiatan	100,00	60%	40,00	0,01	Palembang
54	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp	300.000.000	75,00	2,87	8.615.000	Jumlah dokumen penatausahaan barang milik daerah	1 Laporan	100,00	0	5,00	0,00	Palembang
4	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Rp**	**1.921.435.580**	75,00	33,23	**638.430.950**	**Terlakananya Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah**		100,00		**30,00**	**0,14**	
55	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp	1.535.535.580	75,00	31,60	485.230.950	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas PNS dan Non PNS	1 kegiatan	100,00	10%	20,00	0,09	Palembang
57	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp	185.900.000	75,00	9,14	17.000.000	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat PIM III dan IV	100%	100,00	0	20,00	0,01	Palembang
59	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Rp	200.000.000	75,00	68,10	136.200.000	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek Perundang-undangan	30 orang	100,00	0	70,00	0,04	Palembang
5	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Rp**	**34.549.400.000**	75,00	65,64	**22.677.710.753**	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100,00		**60,00**	**6,42**	
60	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp	350.000.000	75,00	95,53	334.369.000	Jumlah komponen instalasi listrik di lingkungan Setda	1 tahun	100,00	3 bulan	100,00	0,10	Palembang
62	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp	2.871.000.000	75,00	30,94	888.238.419	Jumlah Bahan Logistik kantor	1 kegiatan	100,00	3 bulan	35,00	0,28	Palembang
63	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp	500.000.000	75,00	49,66	248.321.271	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	100,00	0	50,00	0,07	Palembang
65	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp	23.578.400.000	75,00	75,05	17.696.637.477	Jumlah fasilitasi kunjungan tamu	1 kegiatan	100,00	3 bulan	75,00	4,95	Palembang
66	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp	6.850.000.000	75,00	48,20	3.301.556.786	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1500 Laporan	100,00	10%	50,00	0,96	kab/kota Prov.Sumsel dan luar daerah/ luar negeri
67	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp	400.000.000	75,00	52,15	208.587.800	Jumlah Arsip Dinamis pada Sekretariat Daerah	2 Dokumen	100,00	10%	50,00	0,06	Palembang
6	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Rp**	**16.176.279.700**	75,00	73,92	**11.957.826.137**	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 kegiatan	100,00		70,00	12,08	Palembang
68	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp	2.646.279.700	75,00	86,70	2.294.200.000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20 unit	100,00	0	100,00	0,74	Palembang
70	Pengadaan Mebel	Rp	2.530.000.000	75,00	35,06	886.917.750	Pembelian Meubeler	20 Paket	100,00	10%	50,00	0,35	Palembang
72	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp	11.000.000.000	75,00	79,79	8.776.708.387	Jumlah Prasarana Aset Tak Berwujud	18 Unit	100,00	10%	80,00	2,47	Palembang
7	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Rp**	**50.691.590.000**	75,00	66,74	**33.829.807.284**	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	150 jenis	100,00	10%	60,00	8,52	Palembang
73	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp	220.000.000	75,00	51,01	112.222.500	Pembelian Materai, Jasa Pengiriman Surat	12 Laporan	100,00	20%	60,00	17,18	
74	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	10.000.000.000	75,00	59,03	5.903.370.804	Jumlah Tagihan telepon, air dan listrik	12 Laporan	100,00	20%	50,00	1,40	Palembang
75	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp	27.000.000.000	75,00	80,32	21.685.251.950	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	100,00	10%	70,00	5,29	Palembang
76	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	13.471.590.000	75,00	45,50	6.128.962.030	Jumlah pelaksanaan acara/kegiatan	12 Laporan	100,00	pelaksanaan acara selama 3 bulan	50,00	1,89	Palembang
8	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Rp**	**61.366.790.255**	75,00	41,81	**25.656.184.779**	Terlaksananya pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100,00		**50,00**	8,60	Palembang

77	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Rp	802.000.000	75,00	34,60	277.464.674	Jumlah Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 kegiatan	100,00	10	40,00	**8,94**	
78	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional atau Lapangan	Rp	10.475.364.943	75,00	45,02	4.715.786.821	Jumlah Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	1 kegiatan	100,00	10	50,00	1,47	Palembang
79	Pemeliharaan Mebel	Rp	600.000.000	75,00	89,86	539.182.000	Jumlah mebel yang dipelihara	1 Paket	100,00	10%	100,00	0,17	Palembang
82	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp	47.917.605.360	75,00	40,48	19.394.700.884	Jumlah bangunan dan gedung kantor yang tepelihara secara rutin dan baik	26 Aset bangunan dan gedung kantor	100,00	10	40,00	5,37	Palembang
83	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Bangunan Lainnya	Rp	1.571.819.952	75,00	46,38	729.050.400	Jumlah sarana dan prasarana bangunan dan gedung kantor yang tepelihara secara rutin dan baik	1 kegiatan	100,00	20	50,00	0,22	Palembang
9	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Rp**	**12.150.462.000**	75,00	49,33	**5.993.896.736**	Terlakasananya administrasi keuangan dan operasional KDH dan WKDH		100,00	25%	50,00	1,70	Palembang
84	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp	77.490.000	75,00	62,72	48.600.000	Gaji dan Tunjangan KDH dan WKDH		100,00		**40,00**	0,01	Palembang
85	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		3.000.000.000	75,00	54,57	1.637.163.236	Pakaian Dinas DAN atribut Kelengkapan KDH dan WKDH	1 Kegiatan	100,00	10	60,00	**6,71**	
86	Penyediaan Dana Penunjang Operasional KDH dan WKDH	Rp	9.057.972.000	75,00	47,56	4.308.133.500	Tersedianya Dana Operasional KDH/WKDH	1 kegiatan	100,00	0	50,00	1,27	Palembang
87	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp	15.000.000	75,00	0,00	-	Terlaksananya Medical Check Up KDH dan WKDH	1 kegiatan	100,00	0	0,00	0,00	Palembang
10	**Fasilitasi Kerumahtanggan Sekretariat Daerah**	**Rp**	**19.520.184.218**	75,00	61,91	**12.085.795.800**	Tersedianya fasilitasi Kerumahtangaan Sekretaris Daerah	1 kegiatan	100,00	0	60,00	3,28	Palembang
88	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Rp	12.861.884.218	75,00	65,22	8.388.954.350	Kebutuhan KDH	100%	100,00	10%	60,00	2,16	Palembang
89	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Rp	5.350.000.000	75,00	50,39	2.695.830.850			100,00		50,00		
90	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretaris Daerah	Rp	1.308.300.000	75,00	76,51	1.001.010.600	Kebutuhan Sekretaris Daerah	100%	100,00	10%	80,00	0,29	Palembang
11	**Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan**	**Rp**	**30.263.005.233**	75,00	54,77	**16.575.719.044**	Tersedianya fasilitasi materi dan Komunikasi Pimpinan	100%	100,00	10%	60,00	5,09	Palembang
91	Penyiapan Materi Pimpinan	Rp	3.645.858.137	75,00	60,71	2.213.443.266	Penyusunan dan penggandaan bahan materi rapat dalam bentuk naskah pidato pimpinan serta terwujudnya penyebaran informasi pembangnan berbagai event dalam bentuk buku dan majalah	300 kali kegiatan	100,00	25%	60,00	0,61	Palembang
92	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Rp	2.677.696.872	75,00	39,43	1.055.783.387	Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan pimpinan serta melaksanakan koordinasi dan kesiapan sarana dan prasarana yang berhubungan dengan upacara hari besar, pengambilan sumpah dan pelantikan pejabat/pegawai, acara lainnya	250 kali kegiatan	100,00	20%	50,00	**6,02**	
93	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Rp	23.939.450.224	75,00	55,58	13.306.492.391	Melaksanakan penataan dan dokumentasi hasil pelaksanaan pembangunan atau pemerintahan serta melaksanakan pendokumentasian peliputan kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Sekretaris Daerah berdasarkanketentuan peraturan perundang-undangan	250 Media	100,00	5%	60,00	4,02	Palembang
12	**Fasilitasi Keprotokolan**	**Rp**	**9.000.573.625**	75,00	48,47	**4.362.273.822**	Tersedianya Fasilitasi Keprotokolan		100,00		**50,00**	1,26	Palembang

94	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Rp	5.280.573.625	75,00	48,14	2.541.869.143	Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatanpimpinan serta melaksanakan koordinasi dan kesiapan sarana prasarana yang berhubungan dengan upacara hari besar, pengambilan sumpah dan pelantikan pejabat/pegawai, acara lainnya	250 kali kegiatan	100,00	30%	50,00	0,74	palembang
95	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp	3.000.000.000	75,00	60,68	1.820.404.679	Melaksanakan tata protoler/laksana dalam rangka penyambutan tamu Pemerintah Daerah	200 Penerimaan Kunker	100,00	20%	70,00	**0,00**	
96	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Rp	720.000.000	75,00	0,00	-	Melaksakan pembinaan tata protokoler/laksana suatu kegiatan aktivitaspada Pimpinan Daerah	85 Orang	100,00	0	0,00	0,00	Palembang
VIII	**PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Rp**	**35.603.937.210**	75,00	0,00	-	Terlaksananya Program Kesejahteraan Rakyat berupa fasilitasi pembinaan mental spiritual, fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar dan Non Pelayanan Dasar	100%	100,00	0	0,00	0,00	Palembang
1	**Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual**	**Rp**	**35.023.181.410**	75,00	0,00	-	Tersedianya Fasilitasi Pembinan Mental Spiritual		100,00		**0,00**	0,00	Palembang
97	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Rp	18.149.350.000	75,00	49,60	9.002.349.200	Jumlah Kab/Kota yang menerima bantuan Gubernur di bidang keagamaan Hibah Organisasi Keagamaan Hibah Kepada Dewan Pengurus Pusat Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI)	17 Kab/Kota	100,00	0	50,00	25,49	Kab/Kota di Prov.Sumsel
97	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Rp	16.873.831.410	75,00	51,42	8.676.874.349	Rumusan Rekomendasi/Laporan/bahan Kebijakan	17 Kab/Kota	100,00	0	60,00	28,44	Kab/Kota di Prov.Sumsel
2	**Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar**	**Rp**	**221.272.500**	75,00	0,00	-	Tersedianya fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat Pelayanan Dasar		100,00		**0,00**	**0,32**	
98	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Rp	40.622.500	75,00	78,72	31.976.830	Jumlah Evaluasi, pengawasan dan pembinaan kelembagaan TP-UKS	17 Kab/Kota	100,00	0	80,00	0,21	kab/Kota di Prov.Sumsel
99	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Rp	91.650.000	75,00	39,37	36.080.305	Rumusan Rekomendasi/Laporan/bahan Kebijakan	17 Kab/Kota	100,00	0	45,00	0,11	Palembang
100	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Rp	89.000.000	75,00	20,65	18.378.255			100,00		30,00		
3	**Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar**	**Rp**	**359.483.300**	75,00	0,00	-	**Tersedianya fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat Non Pelayanan Dasar**		100,00		**0,00**	**0,44**	
101	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	Rp	258.360.800	75,00	49,22	127.163.370	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	1 Dokumen	100,00	0	60,00	0,44	Palembang
102	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Transmigrsi dan Tenaga Kerja	Rp	32.850.000	75,00	35,87	11.782.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Transmigrsi dan Tenaga Kerja	1 Dokumen	100,00	0	40,00	0,04	Palembang

103	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informaika, Statistik, Persandian dan Perhubungan	Rp 68.272.500	75,00	52,03	35.519.390	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informaika, Statistik, Persandian dan Perhubungan	1 Dokumen	100,00	0	60,00	0,23	Palembang
	Jumlah 103 Kegiatan	**Rp 440.852.319.802**		**61,13**	**Rp 269.502.869.757**							
										qw		